eJournal Pembangunan Sosial, 2025, 13 (3): 397- 407
ISSN 0000-0000, ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2025

PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)DI DESA MAKMUR JAYA KECAMATAN KONGBENG

Annisa Awalyah [1] Aji Eka Qamara Yulianti Dewi Hakim[2]

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas peran pendamping dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)..Penelitian ini menganalisis peran pendamping PKH di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teori Ife dan Tesoriero yang membagi peran pendamping menjadi empat aspek: fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari pendamping PKH, aparat desa, dan sembilan KPM, serta observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendamping memiliki kontribusi penting, keempat aspek peran tersebut belum berjalan secara optimal di Desa Makmur Jaya. Penambahan tenaga pendamping, perbaikan sistem informasi, dan penguatan kemitraan untuk meningkatkan efektivitas program PKH dalam mengentaskan kemiskinan menjadi perhatian.

Kata Kunci :*Program Keluarga Harapan, pendamping sosial, pemberdayaan masyarakat*

Pendahuluan

Indonesia menghadapi tantangan struktural kemiskinan yang kompleks dengan jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang (9,57%) pada September 2022, meskipun mengalami fluktuasi signifikan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan lonjakan hingga 27,55 juta orang (10,19%) pada September 2020 (BPS, 2018b). Paradoks kemiskinan terlihat jelas di Provinsi Kalimantan Timur yang kaya sumber daya alam namun masih memiliki 236.250 penduduk miskin (6,31%) pada Maret 2022, dengan Kabupaten Kutai Timur menempati posisi ketiga tertinggi sebanyak 36,84 ribu jiwa (BPS, 2024).

[1] Mahasiswa Program Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: annisaawalyah39@gmail.com
[2] Dosen Pembimbing Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kemiskinan multidimensional ini berdampak pada rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, dimana keluarga miskin menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses perawatan medis dan membiayai pendidikan anak-anak mereka (Haemmerli et al., 2021), sehingga menciptakan siklus kemiskinan antar generasi yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Merespons kompleksitas permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang terbukti efektif di berbagai negara seperti Meksiko, Brasil, dan Filipina dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberdayaan ibu rumah tangga dan kontinuitas pendidikan anak-anak, dengan implementasi di Kabupaten Kutai Timur sejak 2013 yang menjangkau 139 desa dan 2 kelurahan tersebar di 18 kecamatan. Khususnya di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng, program ini melayani 56 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 1.625 Kepala Keluarga sejak 2016, dengan satu orang pendamping PKH yang menjalankan program P2K2 untuk melatih keterampilan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan keterampilan spesifik sesuai potensi lokal, namun menghadapi dinamika sosial kompleks termasuk kecemburuan sosial antar masyarakat terkait distribusi bantuan.

Implementasi PKH di Desa Makmur Jaya menghadapi kendala operasional krusial terutama dalam ketepatan sasaran penyaluran dana kepada RTSM, yang disebabkan oleh lambatnya proses verifikasi data dan keterlambatan pencairan dana bantuan yang menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas peran pendamping PKH. Pendamping memiliki tanggung jawab strategis dalam menjamin ketepatan sasaran bantuan, melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penerima manfaat, serta menjalankan fungsi fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis sesuai kerangka teori Ife dan Tesoriero (2016) untuk memastikan program mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara komprehensif peran pendamping PKH di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng guna memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas pendampingan dalam mencapai tujuan program, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang perlindungan sosial dan kontribusi praktis sebagai referensi bagi pemangku kepentingan dalam evaluasi dan perbaikan implementasi program PKH di tingkat desa.

Kerangka Dasar Teori

Teori peran pendamping

Teori Ife & Tesoriero (2016) mengembangkan kerangka komprehensif mengenai peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat yang terbagi menjadi empat aspek utama: peran fasilitatif, edukasional, perwakilan, dan teknis. Keempat peran ini membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dan berkesinambungan dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. Peran fasilitatif berfungsi mendorong individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan usaha secara efisien, sementara peran edukasional bertujuan memberikan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman kepada masyarakat yang didampingi. Peran perwakilan dalam teori ini merupakan fungsi interaksi dengan pihak luar untuk manfaat masyarakat dan memberikan keuntungan bagi komunitas yang didampingi. Adapun peran teknis berhubungan dengan urusan administratif dan teknologis pendamping sebagai seorang pendamping sosial. Melalui pelaksanaan keempat peran ini secara simultan, pendamping diharapkan mampu mendorong Keluarga Penerima Manfaat menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan, di mana masyarakat menjadi subjek perubahan, bukan sekadar objek program (Ife & Tesoriero, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng. Analisis peran pendamping PKH dilakukan dengan menggunakan teori peran pendamping dari Ife & Tesoriero (2016). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama tiga bulan di Desa Makmur Jaya. Informan penelitian terdiri dari 9 orang KPM yang dipilih dari total 56 KPM (sekitar 15%). Pemilihan informan didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu kondisi tempat tinggal yang mencerminkan realitas kemiskinan, jumlah tanggungan keluarga yang besar, keberagaman kategori bantuan yang diterima, serta keterbukaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan PKH. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) secara konseptual merupakan *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat yang berbeda dengan subsidi langsung tunai yang bersifat tanpa syarat. PKH telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2007 sebagai program lintas departemen yang melibatkan Bappenas, Kementerian Sosial, Kesehatan,

Pendidikan, Agama, Komunikasi dan Informasi, serta BPS (Rohman, 2009). Tujuan utama PKH adalah memperbaiki akses dan kualitas layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, melalui bantuan bersyarat yang mendorong peningkatan partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga sangat miskin (Kemensos RI, 2016). Program ini juga memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah usia enam tahun memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan demikian, efektivitas PKH tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan finansial, tetapi juga dari seberapa jauh pendamping mampu menjalankan perannya dalam mendukung KPM memenuhi kewajiban syarat tersebut. Kriteria penerima bantuan PKH terbagi menjadi tiga aspek utama:

Tabel 1 Kriteria dan Besaran Bansos PKH

Penerima	Kategori	Jumlah	Pencairan
Pendidikan	SD	Rp. 900.000	4 kali per tahun
	SMP	Rp. 1.500.000	4 kali per tahun
	SMA	Rp. 2.000.000	4 kali per tahun
Kesehatan	Anak Usia Dini	Rp. 3.000.000	4 kali per tahun
	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	4 kali per tahun
	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000	4 kali per tahun
Kesejahteraan Sosial	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	4 kali per tahun

Sumber : Data Penelitian, 2024

Mekanisme penyaluran PKH mengikuti Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai melalui empat tahapan: pendaftaran dan pembukaan rekening, pendidikan dan sosialisasi, distribusi bantuan berkala ke rekening penerima, serta pengeluaran dana oleh penerima melalui penyedia yang ditunjuk. Proses ini bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial, sekaligus mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Waktu pemberian bantuan tidak dibatasi secara kaku, tetapi dilakukan selama keluarga masih memenuhi kriteria sebagai RTSM dan memiliki komponen sesuai kategori bantuan, dengan evaluasi rutin oleh pendamping sosial untuk memastikan kelayakan keberlanjutan program.

Peran Fasilitatif

Pelaksanaan peran fasilitatif pendamping PKH di Desa Makmur Jaya terlihat dari keterlibatannya dalam membantu KPM mengakses layanan sosial dasar, seperti pengurusan dokumen kependudukan dan layanan kesehatan, bahkan dengan mendampingi langsung ke kantor desa maupun dinas terkait. Beberapa

KPM merasakan manfaat langsung dari peran ini, misalnya penyelesaian akta kelahiran anak hingga pendataan penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan. Salah satu KPM menyampaikan: *"Saya tidak tahu kalau anak saya belum punya akta kelahiran itu bisa bikin susah masuk sekolah, untungnya Bu NA bantu sampai ke kantor desa dan ke Dukcapil akhirnya bisa selesai dan anak saya bisa daftar SMP"* (Wawancara dengan Ibu K, KPM, 15 Januari

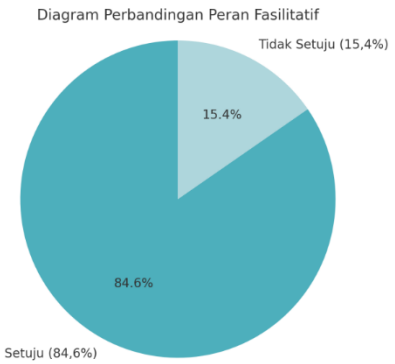

Gambar 1. Diagram Perbandingan Peran Fasilitatif

Berdasarkan diagram perbandingan peran fasilitatif, sebanyak 11 informan (84,6%) menyatakan setuju terhadap pelaksanaan peran fasilitatif, sementara 2 informan (15,4%) menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas informan merasakan manfaat dari peran fasilitatif pendamping PKH, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam menjangkau seluruh KPM secara merata.

Peran Edukasional

Peran edukasional pendamping PKH di Desa Makmur Jaya diwujudkan melalui kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang rutin dilaksanakan setiap bulan untuk meningkatkan kapasitas KPM agar lebih mandiri. Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan keuangan, menabung, prioritas pengeluaran, pola asuh anak, gizi keluarga, hingga kesehatan dan pola hidup bersih, yang terbukti relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dampak kegiatan ini terlihat dari perubahan perilaku KPM, sebagaimana diungkapkan salah satu informan: *"Dulu saya kalau dapat bantuan langsung habis buat belanja semua. Tapi setelah ikut pertemuan itu, saya belajar pisahkan uang belanja dan tabungan anak*

sekolah. Jadi sekarang lebih teratur dan nggak panik kalau ada keperluan mendadak" (Wawancara dengan Ibu H, KPM, 15 Januari 2025).

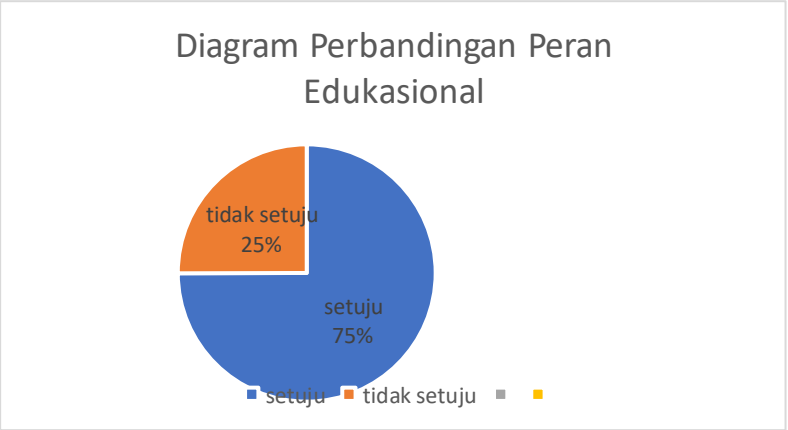

Gambar 2. Diagram Perbandingan Peran Edukasional

Diagram perbandingan peran edukasional menunjukkan bahwa 6 informan (75,0%) menyatakan setuju terhadap pelaksanaan peran edukasional, sementara 2 informan (25,0%) menyatakan tidak setuju. Meskipun mayoritas informan telah merasakan manfaat dari peran edukasional pendamping, pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh KPM secara merata.

Peran Perwakilan

Peran perwakilan pendamping PKH di Desa Makmur Jaya berkaitan dengan kemampuannya dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan KPM kepada pihak eksternal seperti pemerintah desa, dinas sosial, sekolah, maupun puskesmas. Dalam praktiknya, pendamping sudah membantu beberapa kasus, misalnya pengurusan bantuan bagi penyandang disabilitas. Seorang KPM mengungkapkan: *"Anak saya nggak bisa jalan normal mba, waktu itu datanya sempat nggak masuk. Tapi Bu NA bantu urus ke puskesmas, terus kirim data lagi ke dinas. Alhamdulillah sekarang anak saya tetap dapat bantuannya"* (Wawancara dengan Bapak RK, KPM, 15 Januari 2025).

Pendamping juga pernah mengusulkan agar lansia yang tinggal sendiri dimasukkan ke dalam daftar kunjungan petugas kesehatan sehingga tetap mendapat perhatian. Namun, secara umum peran perwakilan ini belum maksimal karena terbatas pada penyampaian aspirasi kepada pihak pemerintah desa atau dinas sosial. Salah seorang informan menyebutkan: *"Selama saya ikut PKH, saya belum pernah lihat bu pendamping itu kerja sama dengan pihak luar. Biasanya cuma dari dinas*

sosial atau datang sendiri" (Wawancara dengan Ibu L, KPM, 20 Januari 2025). Kepala Desa juga mengonfirmasi bahwa kemitraan dengan pihak eksternal belum

pernah dilakukan.

Gambar 3. Diagram Perbandingan Peran Perwakilan

Diagram perbandingan peran perwakilan menunjukkan hasil yang kontras dengan peran lainnya, di mana hanya 4 informan (44,4%) yang menyatakan setuju, sementara 5 informan (55,6%) menyatakan tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pendampingan PKH di Desa Makmur Jaya masih terbatas pada pelaksanaan tugas pokok yang bersifat administratif dan operasional, tanpa menjangkau lembaga lain yang seharusnya dapat berperan dalam memperkuat keberhasilan program.

Peran Teknis

Peran teknis pendamping PKH di Desa Makmur Jaya, yang mencakup verifikasi dan validasi data, pembaruan informasi penerima, pelaporan, serta kunjungan rumah, masih menghadapi banyak kendala sehingga belum berjalan efektif. Masalah utama adalah ketidakakuratan data dan lambatnya proses verifikasi. Kepala Desa menyampaikan: *"Masalah data itu yang paling sering jadi keluhan. Kadang ada yang sudah meninggal atau pindah, tapi datanya masih aktif. Warga yang lebih layak justru belum masuk"* (Wawancara dengan Saepul Bahri, 12 Maret 2025). Keluhan serupa juga diungkapkan KPM: *"Saya dulu sempat nggak dapat bantuan hampir setahun, katanya karena data belum masuk. Tapi saya sudah lapor ke Bu NA waktu itu dan rumah saya tidak pernah ada kunjungan"* (Wawancara dengan Bapak RK, 10 Maret 2025). Hambatan lain berupa keterlambatan input data, keterbatasan jaringan internet, serta beban kerja tinggi karena hanya satu pendamping menangani seluruh desa. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dalam penetapan penerima bantuan dan memicu kecemburuan sosial.

Gambar 4. Diagram Perbandingan Peran Teknis

Diagram perbandingan peran teknis menunjukkan hasil yang paling mengkhawatirkan, di mana seluruh informan (100%) menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan peran teknis pendamping. Tidak ada satu pun informan yang menyatakan setuju, mengindikasikan bahwa peran teknis merupakan aspek yang paling lemah dalam pelaksanaan tugas pendamping PKH di Desa Makmur Jaya.

b. Pembahasan

Peran Fasilitasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH di Desa Makmur Jaya telah menjalankan peran fasilitatif dengan membantu KPM mengakses layanan dasar, terutama dokumen kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini sejalan dengan teori Ife dan Tesoriero (2016) yang menekankan bahwa fasilitasi bertujuan membuka akses dan memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya. Dampak positif dari peran ini tercermin pada meningkatnya partisipasi masyarakat, seperti kemudahan anak KPM dalam mendaftar sekolah serta keterlibatan keluarga dalam layanan kesehatan. Namun, pelaksanaan peran fasilitatif belum merata di seluruh KPM karena keterbatasan jumlah pendamping dan luasnya wilayah kerja, sehingga sebagian keluarga masih mengalami hambatan dalam mengakses layanan sosial dasar.

Peran Edukasional

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan P2K2 memberikan kontribusi nyata dalam membentuk perilaku baru KPM, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan kesadaran terhadap pendidikan serta kesehatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran edukasional tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku. Kondisi ini sesuai dengan teori Ife dan Tesoriero (2016) yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar lebih mandiri dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Peran Perwakilan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran perwakilan pendamping PKH masih terbatas pada penyampaian aspirasi kepada instansi pemerintah setempat tanpa adanya upaya menjalin kerja sama dengan pihak eksternal yang dapat memperluas dukungan. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik di lapangan belum sesuai dengan konsep ideal Ife dan Tesoriero (2016) yang menekankan pentingnya jejaring eksternal untuk memperluas akses sumber daya dan memperkuat kemandirian masyarakat. Ketiadaan kerja sama dengan lembaga non-pemerintah, swasta, atau organisasi masyarakat sipil membuat KPM tetap bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah, sehingga peluang pemberdayaan tambahan dari luar belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Peran Teknis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran teknis merupakan aspek yang paling lemah dalam pelaksanaan PKH di Desa Makmur Jaya. Keterlambatan input data, kurangnya home visit, dan terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan pendataan tidak akurat serta bantuan tidak tepat sasaran. Situasi ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, karena ada keluarga yang masih mampu tetap menerima bantuan sementara keluarga yang lebih membutuhkan terabaikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan konsep Ife dan Tesoriero (2016) yang menekankan pentingnya peran teknis berupa administrasi, monitoring, verifikasi data, dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan program berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

Evaluasi Komprehensif Peran Pendamping PKH

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai hasil penelitian terhadap pelaksanaan peran pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Makmur Jaya, dilakukan pemetaan berdasarkan empat kategori peran pendamping menurut teori Ife & Tesoriero (2016). Evaluasi ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng

No	Aspek Peran Pendamping	Uraian Peran Menurut Ife & Tesoriero	ST	BS	Keterangan
1.	Fasilitatif	Mendorong partisipasi	✓	-	Pendamping telah mendorong partisipasi dan membantu KPM dalam mengakses layanan sosial dasar.
		Menjembatani akses layanan	✓	-	
2.	Edukasional	Memberi pengetahuan dan pengalaman	✓		Kegiatan edukasi seperti P2K2 telah memberi pengetahuan dan pengalaman baru kepada KPM meskipun belum terlaksana secara rutin dan menyeluruh.
		Meningkatkan kapasitas KPM	✓		
3.	Perwakilan	Menyuarakan aspirasi	✓		Pendamping menjembatani komunikasi antara KPM dan pihak luar, tetapi keterbatasan waktu dan jumlah tenaga membuat belum semua aspirasi terakomodasi.
		Hubungan dengan pihak luar	-	✓	
4.	Teknis	Tugas administratif & teknis	-	✓	Tugas administratif dan kunjungan lapangan belum sepenuhnya pendamping lakukan, dikarenakan keterbatasan sumber daya menyebabkan beberapa proses teknis belum maksimal.
		Pendataan, laporan & (home visit)	-	✓	

Sumber : Data Analisis,2025

Keterangan: ST = Sudah Terlaksana, BS = Belum Sepenuhnya

Evaluasi komprehensif menunjukkan bahwa dari empat peran pendamping PKH di Desa Makmur Jaya, aspek fasilitatif dan edukasional telah berjalan cukup baik meski masih membutuhkan pemerataan dan konsistensi, sementara peran perwakilan hanya sebatas penyampaian aspirasi tanpa dukungan kemitraan eksternal, dan peran teknis menjadi yang paling lemah akibat kendala pendataan, verifikasi, serta kunjungan lapangan yang terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya bergantung pada penyaluran bantuan secara administratif, tetapi juga pada kemampuan pendamping dalam membangun kapasitas dan kemandirian KPM. Hambatan berupa keterbatasan tenaga pendamping, tingginya beban kerja, dan lemahnya sistem pendukung menuntut adanya reformasi struktural, baik melalui penambahan sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, maupun pembangunan jejaring dengan pihak luar. Langkah tersebut penting agar implementasi PKH lebih akuntabel, efisien, dan merata dalam menjangkau seluruh penerima manfaat serta memastikan keadilan distribusi dan ketepatan sasaran program secara maksimal.

Kesimpulan

Analisis dengan teori Ife dan Tesoriero (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan empat peran pendamping PKH di Desa Makmur Jaya belum berjalan optimal. Peran fasilitatif dan edukasional telah memberikan hasil positif, meskipun belum merata di seluruh KPM. Peran perwakilan masih lemah karena minimnya kerja sama dengan pihak eksternal, sedangkan peran teknis menjadi aspek paling bermasalah akibat keterlambatan verifikasi data, ketidakakuratan informasi, serta terbatasnya sumber daya manusia. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas program, tetapi juga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena adanya ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Dengan demikian, efektivitas PKH di Desa Makmur Jaya masih dipengaruhi keterbatasan struktural dan memerlukan perbaikan menyeluruh agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Anggraini, R., Sari, D. P., & Wijaya, A. (2023). Analisis multidimensi kemiskinan di Indonesia: Perspektif hak dasar dan akses layanan sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 15(2), 45-62.

Annur, C. M. (2023). Proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2023: Analisis demografi dan implikasi kebijakan. *Indonesian Population Review*, 8(1), 12-28.

Badan Pusat Statistik. (2018a). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2018b). *Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur 2024*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Haemmerli, M., Rodriguez, C., & Thompson, K. (2021). Healthcare access barriers among low-income families: A systematic review of global evidence. *International Journal of Social Policy*, 42(3), 178-195.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi* (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Pedoman umum Program Keluarga Harapan*. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Rohman, A. (2009). Politik dan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 89-104.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi Revisi). PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-26). Alfabeta